

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Situasi Global telah mempercepat pertumbuhan kemajuan di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi yang merupakan tulang punggung dari organisasi-organisasi modern. Perkembangan teknologi informasi ini telah dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi tersebut untuk mendukung efektivitas, produktivitas dan efisiensi mereka.

Banyak perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali maka diperlukan pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-privatepartnership*), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government* (Menkominfo, 2003).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan SI/TI.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/M.KOMINFO/III/2002 tanggal 22 maret 2002 perihal koordinasi Rencana Pembangunan Teknologi Informasi, yang berisikan agar setiap instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaporkan kondisi perkembangan sistem informasi yang ada dilingkungan masing-masing dan mengkoordinasikan setiap rencana pengembangan teknologi informasi dengan kementerian Komunikasi dan Informasi guna tercapainya sinergi, efisiensi, dan integrasi pada Sistem Teknologi Informasi di Indonesia, serta untuk menghindari duplikasi antara instansi. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dengan surat No. 1544/M.PPN/04/2002 tanggal 18 April 2002 perihal Koordinasi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Nasional, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*.

Pemerintah Daerah Tegal menyadari sepenuhnya peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi Pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar.

Sebagaimana kita ketahui fungsi pengelola data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya, seperti halnya sumber daya manusia, keuangan, waktu dan lainnya.

Universitas Indonesia

Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era milenium ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Maka dirasa perlu untuk menyusun Perencanaan Strategis Sistem Informasi didalam lingkungan Pemda Kabupaten Tegal, karena berdasarkan survey, Pemda Kabupaten Tegal belum optimal dalam upaya pemanfaatan TI untuk menyelesaikan berbagai masalah dilingkungan Pemda Kabupaten Tegal, contohnya pemanfaatan SI/TI dalam pengolahan data, Pemda Kabupaten Tegal belum memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani masalah pengelolaan data secara otomatis dan terpusat, pemanfaatan SI/TI untuk mengintegrasikan informasi lintas SKPD, Pemda Tegal masih belum memiliki infrastruktur TI untuk mendukung pertukaran informasi yang terintegrasi antar SKPD, pemanfaatan SI/TI secara strategis, secara keseluruhan pemanfaatan SI/TI yang kurang, menyebabkan Pemda Kabupaten Tegal belum merasakan fungsi SI/TI secara strategis, seperti pengubahan cara kerja dan layanan Pemda Tegal untuk melayani masyarakat dan dunia bisnis jauh lebih cepat dan nyaman. Belum adanya koordinasi, serta penyimpanan data dan informasi yang sifatnya masih pulau-pulau, dimana setiap bidang mengembangkan kebutuhan sistem informasinya sendiri-sendiri, tanpa mengacu pada suatu portofolio atau rencana pemanfaatan TI yang terpadu dan menyeluruh, seluruh SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Tegal masih menyimpan arsip maupun dokumen baik dalam bentuk elektronik dan fisik dimasing-masing satuan kerjanya, sehingga kebutuhan informasi lintas bidang tidak dapat diperoleh secara cepat.

Maka diperlukan suatu perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi pada setiap pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Tegal. Perencanaan Strategis SI/TI ini akan menjadi dasar untuk merencanakan pemanfaatan SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan untuk menentukan strategi atau bentuk pengelolaan SI/TI yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Tegal adalah kurang optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan kebijakan kelembagaan terhadap implementasi SI/TI. Pertanyaan penelitian yang timbul adalah, “Bagaimana menjawab permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi SI/TI yang terencana melalui pendekatan perencanaan strategis sistem informasi yang selaras dengan implementasi *E-Government* dalam kerangka Kebijakan dan Strategi Nasional ?”.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan dibatasi hanya pada perangkat daerah kabupaten Tegal. Adapun perangkat daerah Kabupaten Tegal terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah yang membawahi Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, dan Asisten Administrasi Kemasyarakatan.
 - b. Dinas Daerah kabupaten Tegal yang meliputi : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan, Dinas Kesehatan

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Penelitian dan Pengembangan, Kantor Penanaman Modal, Kantor Kesbangpol dan Linmas.

2. Dengan mempertimbangkan penerapan *E-Government* dalam kerangka Kebijakan dan Strategi Nasional, maka perlu diidentifikasi pola umum perencanaan strategis SI/TI yang didapatkan dari perbandingan dokumen perencanaan strategis SI/TI dari berbagai organisasi pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun perencanaan strategis SI/TI di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang mencakup penentuan target portofolio aplikasi yang harus dibangun dan penentuan strategi, serta bentuk pengelolaan SI/TI yang tepat untuk diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di bidang perencanaan strategis SI/TI.

2. Manfaat Praktis

Perencanaan Strategis SI/TI yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Tegal dan menjadi referensi untuk proses penyusunan perencanaan strategis bagi pemerintah daerah lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas bab-bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan, sasaran, dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang berhubungan dengan penelitian, mencakup metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan pustaka dari beberapa perencanaan strategis yang telah ada.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan dari penelitian, waktu dan tempat, serta bahan dan alat yang digunakan.

BAB 4 PROFIL ORGANISASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai profil Organisasi Pemerintah dan profil salah satu Organisasi Pemerintah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dijadikan contoh kasus dalam pengimplementasian perancangan strategis sistem informasi dalam penelitian ini.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisa Faktor Internal, Analisa Faktor Eksternal, terhadap organisasi, dengan menggunakan teori-teori dan metodologi seperti yang disebutkan dalam Bab II.

BAB 6 PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan evaluasi dari seluruh kegiatan dalam penelitian ini serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.